

Laporan Non-Keuangan pada Organisasi Sektor Publik: Laporan Terintegrasi, Laporan Keberlanjutan, Laporan Populer, dan Pengungkapan Berbasis Web

Gisilowati Dian Purnamasari¹, Indah Murni²

Universitas Pignatelli Triputra¹, Universitas Gadjah Mada²

gisil.upitra@gmail.com¹, indahmurni@mail.ugm.ac.id²

ABSTRACT

This systematic literature review aims to identify key trends and research gaps in non-financial reporting formats: Integrated Reporting (IR), Sustainability Reporting (SR), Popular Reporting (PR), and Web-Based Disclosure (WD) within public sector organizations. The study analyzed 113 articles published between 2020 and 2025 from Google Scholar, Web of Science, and Scopus, supported by keyword co-occurrence analysis and WordCloud visualizations using VosViewer. The findings reveal that IR and SR dominate the public sector non-financial reporting literature and have grown steadily since 2015, playing a pivotal role in fostering integrated thinking, accountability, and socio-environmental transparency. In contrast, PR and WD remain relatively underexplored. Key challenges include limited knowledge, regulatory gaps, and human resource constraints, while emerging innovations involve metaverse-based reporting and digital forensics. Geographically, research is concentrated in Europe. The study's limitations lie in its focus on recent literature, predominantly from Europe. Future research should broaden coverage of PR/WD, conduct longitudinal analyses, assess the impact of reporting on stakeholder decision-making, and develop more accessible digital platforms. Practically, policymakers should enhance transparency through clear regulations and training, while organizations should prioritize stakeholder engagement and integrated information. This review systematically maps trends and gaps, contributes to a conceptual framework, and offers practical insights to strengthen transparency and accountability in public administration.

Keyword: Integrated Reporting, Sustainability Reporting, Popular Reporting, Web-Based Disclosure, Public Sector

ABSTRAK

Tinjauan pustaka sistematis ini bertujuan mengidentifikasi tren utama dan kesenjangan penelitian dalam format pelaporan non-keuangan Integrated Reporting (IR), Sustainability Reporting (SR), Popular Reporting (PR), dan Web-Based Disclosure (WD) pada organisasi sektor publik. Penelitian dilakukan dengan menganalisis 113 artikel terbitan 2020–2025 yang diperoleh dari Google Scholar, Web of Science, dan Scopus, didukung analisis Co-occurrence kata kunci dan visualisasi WordCloud menggunakan VosViewer. Hasilnya menunjukkan bahwa IR dan SR mendominasi literatur pelaporan non-keuangan sektor publik dan terus berkembang sejak 2015, dengan peran penting dalam mendorong pemikiran terintegrasi, akuntabilitas, serta transparansi sosial dan lingkungan. Sementara itu, PR dan WD relatif kurang dieksplorasi. Tantangan yang diidentifikasi meliputi keterbatasan pengetahuan, kesenjangan regulasi, dan keterbatasan sumber daya manusia, sementara

inovasi yang mulai muncul mencakup pelaporan berbasis metaverse dan forensik digital. Secara geografis, kajian lebih banyak terkonsentrasi di Eropa. Keterbatasan penelitian ini terletak pada fokus literatur yang relatif baru dan dominan Eropa. Arah penelitian mendatang disarankan untuk memperluas kajian PR/WD, melakukan studi longitudinal, mengevaluasi dampak pelaporan terhadap pengambilan keputusan pemangku kepentingan, serta mengembangkan platform digital yang mudah diakses. Secara praktis, pembuat kebijakan perlu meningkatkan transparansi melalui regulasi yang jelas dan pelatihan, sedangkan organisasi harus memprioritaskan keterlibatan pemangku kepentingan dan penyajian informasi yang terintegrasi. Studi ini memberikan kontribusi pada pemetaan tren dan kesenjangan secara sistematis, menyusun kerangka konseptual, dan menawarkan wawasan praktis untuk meningkatkan transparansi serta akuntabilitas administrasi publik.

Kata Kunci: Pelaporan Terintegrasi, Pelaporan Keberlanjutan, Pelaporan Populer, Pengungkapan Berbasis Web, Sektor Publik

PENDAHULUAN

Perkembangan akuntabilitas sektor publik telah mendorong penerapan berbagai format pelaporan non-keuangan, antara lain laporan keberlanjutan, laporan terintegrasi, serta laporan tanggung jawab sosial (Broz Tominac et al., 2023). Format-format tersebut dirancang untuk menyajikan informasi yang komprehensif untuk melaporkan kinerja organisasi sektor publik, sekaligus memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan yang beragam (Garcia-Lacalle & Torres, 2021; Nicolo et al., 2021). Oleh karena itu, berbagai model pelaporan non-keuangan seperti *Integrated Reporting* (IR), *Sustainability Reporting* (SR), *Popular Reporting* (PR), and *Web-Based Disclosures* (WD) semakin banyak digunakan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

Penelitian terdahulu menunjukkan adanya berbagai model pelaporan non-keuangan yang digunakan oleh organisasi sektor publik untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Salah satu model yang berkembang adalah Pelaporan Terintegrasi (*Integrated Reporting/IR*) yang menghubungkan data keuangan dengan aspek sosial, lingkungan, dan tata kelola guna memberikan gambaran menyeluruh mengenai kinerja organisasi (Svetlozarova Nikolova, 2023; Tirado-Valencia et al., 2019). Selain itu, organisasi sektor publik juga memanfaatkan laporan keberlanjutan (*Sustainability Reporting/SR*) untuk mengungkapkan kontribusi mereka terhadap pencapaian Sustainability Development Goals (SDGs) serta dampak sosial dan lingkungan yang dihasilkan, sehingga dapat memperkuat transparansi dan akuntabilitas (Broz Tominac et al., 2023; Montesinos & Brusca, 2019). Model pelaporan lain yang digunakan adalah laporan populer (*Popular Reporting/PR*), yang bertujuan meningkatkan kepercayaan dan keterlibatan publik melalui penyajian informasi yang jelas dan ringkas mengenai kinerja serta inisiatif sektor publik (Broz Tominac et al., 2023; Montesinos & Brusca, 2019). Selain itu, pengungkapan berbasis web (*Web-Based Disclosures/WD*) juga semakin banyak diterapkan untuk

menyebarkan informasi non keuangan secara lebih luas dan *real-time*, sehingga memastikan aksesibilitas yang optimal bagi berbagai pemangku kepentingan (Broz Tominac et al., 2023; Rivera-Arrubla et al., 2016).

Penelitian ini menggunakan *Systematic Literature Review* (SLR), metode ini dipilih karena memberikan pendekatan yang sistematis, transparan, dan komprehensif dalam mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mensintesis bukti dari berbagai studi (Marcos-Pablos & García-Peñalvo, 2018). Pemanfaatan alat *Artificial Intelligent* (AI) meningkatkan efisiensi dan akurasi SLR, meskipun tantangan terkait bias masih perlu diatasi (Bolaños et al., 2024). Metode ini membantu peneliti memperoleh pemahaman mendalam dan menentukan arah riset selanjutnya. Sejalan dengan penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan metodologi SLR (Bisogno, 2023; Haini et al., 2020; Manes-Rossi et al., 2020; Pasko et al., 2022). Penelitian ini makalah bertujuan untuk menjawab pertanyaan penelitian sebagai berikut:

- H1 : Apa saja tren dan tema utama yang dapat diidentifikasi dalam literatur mengenai format pelaporan non-keuangan di sektor publik?
- H2 : Apa saja kesenjangan dalam penelitian saat ini terkait format pelaporan non-keuangan pada organisasi sektor publik?

Penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan pemetaan sistematis terhadap tren perkembangan dan kesenjangan kajian ilmiah mengenai format pelaporan non-keuangan khususnya IR, SR, PR, dan WD dalam konteks sektor publik. Temuan dari SLR ini diharapkan memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan kerangka konseptual pelaporan sektor publik.

METODE PENELITIAN

Penelitian SLR dilakukan menggunakan data Google Scholar, menghasilkan 3.155 artikel untuk rentang waktu 2006–2025. Selanjutnya, dilakukan penyaringan dengan fokus pada literatur dalam lima tahun terakhir, sehingga tersisa 1.316 artikel. Dari jumlah tersebut, sebanyak 276 artikel terindeks di *Web of Science* (WoS), sementara 117 artikel terdaftar di Scopus. Penyaringan lebih lanjut dilakukan dengan mengeliminasi artikel yang memiliki data database tidak lengkap atau artikel *proceedings*. Berdasarkan proses seleksi ini, sampel akhir yang digunakan dalam penelitian ini adalah 113 artikel. Pencarian ini dilakukan dengan menggunakan kriteria tertentu agar hanya studi yang relevan dengan tujuan penelitian yang terpilih (Bisogno et al., 2018; Massaro et al., 2016). Untuk memulai pencarian, digunakan kata kunci berikut: "Integrated Reporting" OR "Sustainability Report" OR "Popular Report" OR "Popular Reporting" OR "Webpage Disclosure" OR "Webpage" AND "Public Sector". Data dari database dipilih sebagai sumber data berasal dari Google Scholar, Web of Science dan Scopus.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mayoritas (> 50 %) artikel yang terbit pada 2015-2025 mengenai pelaporan non-keuangan sektor publik berfokus pada *integrated reporting* (IR) dan

sustainability reporting (SR), sedangkan Popular Reporting (PR) dan Web Disclosure (WD) masih sedikit. Penelitian di dominasi oleh negara-negara di Eropa. Terdapat tren kenaikan signifikan pada publikasi tentang pelaporan berbasis digital/open data setelah tahun 2020. Metode penelitian kualitatif studi kasus dominan (> 40 %) dibandingkan kuantitatif dalam literatur pelaporan non-keuangan di sektor publik.

Penelitian terbaru menunjukkan bahwa IR di sektor publik telah beralih dari sekadar uji coba menjadi alat strategis, namun penerapannya masih belum merata. Universitas di Afrika Selatan dan Italia hanya mengadopsi elemen IR secara parsial, sedangkan BUMN Eropa terutama yang besar di sektor sosial lingkungan lebih patuh karena dorongan *European Directive 2014/95/EU* dan tradisi hukum *code-law* yang berorientasi pada pemangku kepentingan. IR terbukti meningkatkan akuntabilitas, efisiensi, dan komunikasi publik apabila disertai partisipasi *stakeholder* yang aktif. Inovasi seperti pelaporan berbasis metaverse membuka peluang baru, tetapi memerlukan akuntansi forensik siber, arsitektur *zero-trust*, dan prosedur digital forensik yang kuat. Keberhasilan IR sektor publik ke depan bergantung pada tiga faktor: (1) regulasi yang tegas, (2) kapabilitas organisasi termasuk SDM dan sistem pengukuran dampak yang memadai, dan (3) adopsi teknologi digital yang aman.

Literatur SR terbaru menunjukkan bahwa praktik di sektor publik masih berada dalam fase transisi, dengan tingkat adopsi yang tertinggal dibandingkan sektor korporasi. Laporan yang tersedia umumnya menitikberatkan dimensi ekonomi atau lingkungan, sementara aspek sosial belum terakomodasi secara memadai. Hambatan utama mencakup kesulitan mengukur dan melaporkan dampak sosial-lingkungan secara kuantitatif serta keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten untuk menyusun laporan berkualitas. Meskipun demikian, bukti empiris menegaskan bahwa keterlibatan aktif pemangku kepentingan dapat meningkatkan akuntabilitas dan memengaruhi arah kebijakan. Selanjutnya, ketika SR atau CSR disejajarkan dengan SDGs dan kerangka *Triple Bottom Line*, laporan tersebut berpotensi mendorong pengambilan keputusan politik yang lebih berkelanjutan.

Pelaporan sektor publik masih didominasi format teknis yang sering kali sulit dipahami oleh masyarakat. Konsep *Integrated Popular Report* (IPR) menjadi salah satu solusi dengan menyajikan informasi keuangan dan non-keuangan dalam bahasa sederhana untuk memperkuat transparansi dan partisipasi warga. Namun, implementasi pelaporan non-keuangan termasuk *sustainability*, *integrated*, dan *popular reporting* masih berada pada tahap awal di banyak negara. Hal tersebut disebabkan karena hambatan keterbatasan pengetahuan, standar, dan regulasi. Jika pelaporan non-keuangan diwajibkan, maka perlu didukung oleh pelatihan bagi manajer publik serta pengembangan platform digital yang ramah pengguna, seperti OpenBDAP, agar laporan publik menjadi inklusif, mudah diakses, dan bermakna bagi seluruh pemangku kepentingan.

Penelitian di Spanyol, tingkat *Webpage Disclosure* pada municipal-owned enterprises belum memenuhi standar Undang-Undang transparansi, menandakan kesenjangan antara regulasi dan praktik. Sementara itu, penelitian Haini et al. (2020)

memetakan 16 faktor adopsi *Open Government Data* ke dalam dimensi teknologi, organisasi, dan lingkungan, serta menawarkan kerangka strategis bagi pembuat kebijakan untuk memperluas keterbukaan data. Dengan demikian, perbaikan keterbukaan informasi secara online memerlukan tindakan dua arah: peningkatan kepatuhan terhadap regulasi transparansi dan penerapan strategi berbasis kerangka *Technology Organization Environment* (TOE) guna mengatasi hambatan adopsi *Open Government Data* (OGD) sekaligus menjadi landasan riset lanjutan.

Proporsi penelitian yang menilai efektivitas pelaporan pada tingkat pemerintah daerah/municipal < 25 % dari total studi, menunjukkan *under-researched* area. Kurang dari 20 % studi menguji dampak pelaporan non-keuangan terhadap pengambilan keputusan pemangku kepentingan (*stakeholder decision usefulness*). Hanya sedikit (< 15 %) penelitian yang menggunakan analisis longitudinal (> 5 tahun) untuk menilai perubahan kualitas pelaporan non-keuangan, menunjukkan kebutuhan studi jangka panjang.

KESIMPULAN DAN SARAN

Tren dan tema utama dalam literatur format pelaporan non-keuangan di sektor publik: Pertama, Mayoritas penelitian fokus pada *Integrated Reporting* (IR) dan *Sustainability Reporting* (SR) yang menggabungkan aspek keuangan dan keberlanjutan. Kedua, tahun 2020, terjadi peningkatan signifikan studi tentang pelaporan digital seperti *Web Disclosure* (WD) dan *Open Government Data* (OGD) untuk transparansi. Ketiga, Pelaporan sektor publik masih teknis dan sulit dipahami, sehingga muncul konsep *Integrated Popular Reporting* (IPR) dengan bahasa sederhana. Keempat, keterlibatan aktif pemangku kepentingan dianggap penting untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi. Kelima, inovasi teknologi seperti pelaporan berbasis metaverse dan digital forensik mulai dikembangkan untuk keamanan dan keandalan data.

Kesenjangan penelitian format pelaporan non-keuangan di sektor publik: Pertama, *Popular Reporting* (PR) dan *Web Disclosure* (WD) masih jarang diteliti, padahal keduanya penting untuk meningkatkan transparansi dan keterlibatan publik. Kedua, studi sebagian besar didominasi oleh negara-negara di Eropa. Ketiga, evaluasi dampak pelaporan terhadap pengambilan keputusan oleh pemangku kepentingan masih sangat terbatas. Keempat, minimnya studi longitudinal menyulitkan penilaian perkembangan kualitas pelaporan secara jangka panjang. Kelima, rendahnya adopsi pelaporan non-keuangan disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan, kurangnya standar dan regulasi yang mengikat, serta rendahnya kapabilitas sumber daya manusia di sektor publik. Keenam, riset mengenai pengembangan platform digital yang mudah diakses dan dipahami masyarakat masih sangat minim.

DAFTAR PUSTAKA

Alsaid, L. A. Z. A., & Ambilichu, C. A. (2024). Performance measurement in urban development: Unfolding a case of sustainability KPIs reporting. *Journal of Accounting in Emerging Economies*, 14(1), 48-74.

<https://doi.org/10.1108/JAEE-09-2021-0299>

- Andrades, J., Martinez-Martinez, D., Herrera, J., & Larran, M. (2024). Is water management really transparent? A comparative analysis of ESG reporting of Andalusian publicly-owned enterprises. *Public Money & Management*, 44(3), 208–215. <https://doi.org/10.1080/09540962.2023.2171844>
- Badia, F., Bracci, E., & Tallaki, M. (2020). Quality and Diffusion of Social and Sustainability Reporting in Italian Public Utility Companies. *Sustainability*, 12(11), 4525. <https://doi.org/10.3390/su12114525>
- Bisogno, M. (2023). Transition management strategies of confiscated mafia-type firms: The role of public administrations and nonprofit organizations. *Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management*, 35(6), 121–139. <https://doi.org/10.1108/JPBAFM-03-2023-0041>
- Bisogno, M., Abate, F., & Citro, F. (2025). Environmental and sustainability accounting, budgeting and reporting: A structured literature review. *Journal of Accounting Literature*, 47(5), 270–299. <https://doi.org/10.1108/JAL-06-2024-0135>
- Bisogno, M., Dumay, J., Manes Rossi, F., & Tartaglia Polcini, P. (2018). Identifying future directions for IC research in education: A literature review. *Journal of Intellectual Capital*, 19(1), 10–33. <https://doi.org/10.1108/JIC-10-2017-0133>
- Bolaños, F., Salatino, A., Osborne, F., & Motta, E. (2024). Artificial intelligence for literature reviews: Opportunities and challenges. *Artificial Intelligence Review*, 57(10), 259. <https://doi.org/10.1007/s10462-024-10902-3>
- Broz Tominac, S., Ljubić, M., & Dragija Kostić, M. (2023). What are the reasons behind publishing non-financial reports by Croatian public sector entities?: A survey of public managers. *Management*, 28(1), 153–167. <https://doi.org/10.30924/mjcmi.28.1.10>
- Calazans, N., Marques, T., Eugénio, T., & Gomes, J. F. S. (2025). Sustainability Report of Portuguese Municipalities: The Three Pillars of Sustainable Development. *Public Organization Review*, 25(1), 169–191. <https://doi.org/10.1007/s11115-024-00782-0>
- Domingues, A. R., Lozano, R., Ceulemans, K., & Ramos, T. B. (2017). Sustainability reporting in public sector organisations: Exploring the relation between the reporting process and organisational change management for sustainability. *Journal of Environmental Management*, 192, 292–301. <https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2017.01.074>
- Eltrudis, D., Monfardini, P., & Pattaro, A. F. (2024). Public auditors' perception of digital platforms for popular reporting: Insights from the case study of OpenBDAP. *International Journal of Public Sector Management*. <https://doi.org/10.1108/IJPSM-01-2024-0012>
- Farneti, F., Casonato, F., Montecalvo, M., & De Villiers, C. (2019). The influence of integrated reporting and stakeholder information needs on the disclosure of social information in a state-owned enterprise. *Meditari Accountancy Research*, 27(4), 556–579. <https://doi.org/10.1108/MEDAR-01-2019-0436>
- Fusco, F., Pavone, P., & Ricci, P. (2024). Strengthening accountability and

- sustainability reporting: Does stakeholder engagement really work? Evidence from the judicial sector. *Social Responsibility Journal*, 20(5), 1015–1039. <https://doi.org/10.1108/SRJ-05-2023-0248>
- Galizzi, G., Bassani, G., & Cattaneo, C. (2023). How to integrate gender budgeting in the public agenda: Insights from an Italian local government. *Public Money & Management*, 43(6), 551–558. <https://doi.org/10.1080/09540962.2023.2201041>
- Garcia-Lacalle, J., & Torres, L. (2021). Financial Reporting Quality and Online Disclosure Practices in Spanish Governmental Agencies. *Sustainability*, 13(5), 2437. <https://doi.org/10.3390/su13052437>
- Garlatti, A., Iacuzzi, S., Dokalskaya, I., & Pericolo, E. (2024). Integrated reporting and its pluralistic perspective: Promoting public value and accountability in public sector accounting? *Public Money & Management*, 44(8), 685–695. <https://doi.org/10.1080/09540962.2024.2398769>
- Guthrie, J., Manes-Rossi, F., Orelli, R. L., & Sforza, V. (2024). Performance management and measurement impacts on universities: (Re)viewing the past, present and future. *Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management*, 36(6), 1–25. <https://doi.org/10.1108/JPBAFM-10-2023-0176>
- Haini, S. I., Ab. Rahim, N. Z., Mohd. Zainuddin, N. M., & Ibrahim, R. (2020). Factors Influencing the Adoption of Open Government Data in The Public Sector: A Systematic Literature Review. *International Journal on Advanced Science, Engineering and Information Technology*, 10(2), 611–617. <https://doi.org/10.18517/ijaseit.10.2.9488>
- Huy, P. Q., & Phuc, V. K. (2025). Trade and Non-trade Logistic Integrated Reporting in Metaverse Government within Cyber Forensic Accounting. *Journal of Distribution Science*, 23(4), 39–48. <https://doi.org/10.15722/JDS.23.04.202504.39>
- Joaquim, R., Jorge, S., & Pimentel, L. M. (2025). Popular reporting in the public sector: A systematic literature review and reflections for future research. *Journal of Accounting & Organizational Change*. <https://doi.org/10.1108/JAOC-11-2023-0201>
- Kaur, A., & Lodhia, S. (2018). Stakeholder engagement in sustainability accounting and reporting: A study of Australian local councils. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 31(1), 338–368. <https://doi.org/10.1108/AAAJ-12-2014-1901>
- Kılıç, M., Uyar, A., Kuzey, C., & Karaman, A. S. (2021). Does institutional theory explain integrated reporting adoption of Fortune 500 companies? *Journal of Applied Accounting Research*, 22(1), 114–137. <https://doi.org/10.1108/JAAR-04-2020-0068>
- Lodhia, S., Jacobs, K., & Park, Y. J. (2012). Driving Public Sector Environmental Reporting: The disclosure practices of Australian Commonwealth Departments. *Public Management Review*, 14(5), 631–647. <https://doi.org/10.1080/14719037.2011.642565>

- Manes-Rossi, F. (2019). New development: Alternative reporting formats: a panacea for accountability dilemmas? *Public Money & Management*, 39(7), 528–531. <https://doi.org/10.1080/09540962.2019.1578540>
- Manes-Rossi, F., Nicolò, G., & Argento, D. (2020). Non-financial reporting formats in public sector organizations: A structured literature review. *Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management*, 32(4), 639–669. <https://doi.org/10.1108/JPBAFM-03-2020-0037>
- Marcos-Pablos, S., & García-Peñalvo, F. J. (2018). Decision support tools for SLR search string construction. *Proceedings of the Sixth International Conference on Technological Ecosystems for Enhancing Multiculturality*, 660–667. <https://doi.org/10.1145/3284179.3284292>
- Massaro, M., Dumay, J., & Guthrie, J. (2016). On the shoulders of giants: Undertaking a structured literature review in accounting. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 29(5), 767–801. <https://doi.org/10.1108/AAAJ-01-2015-1939>
- Mauro, S. G., Cinquini, L., Simonini, E., & Tenucci, A. (2020). Moving from Social and Sustainability Reporting to Integrated Reporting: Exploring the Potential of Italian Public-Funded Universities' Reports. *Sustainability*, 12(8), 3172. <https://doi.org/10.3390/su12083172>
- Montecalvo, M., Farneti, F., & De Villiers, C. (2018). The potential of integrated reporting to enhance sustainability reporting in the public sector. *Public Money & Management*, 38(5), 365–374. <https://doi.org/10.1080/09540962.2018.1477675>
- Montesinos, V., & Brusca, I. (2019). Non-financial reporting in the public sector: Alternatives, trends and opportunities. *Revista de Contabilidad*, 22(2), 122–128. <https://doi.org/10.6018/rcsar.383071>
- Nicolo, G., Zanellato, G., Manes-Rossi, F., & Tiron-Tudor, A. (2021). Corporate reporting metamorphosis: Empirical findings from state-owned enterprises. *Public Money & Management*, 41(2), 138–147. <https://doi.org/10.1080/09540962.2020.1719633>
- Nicolò, G., Zanellato, G., & Tiron-Tudor, A. (2020). Integrated Reporting and European State-Owned Enterprises: A Disclosure Analysis Pre and Post 2014/95/EU. *Sustainability*, 12(5), 1908. <https://doi.org/10.3390/su12051908>
- Özçelik, M., Deran, A., & Veli Alici, O. (2025). Internal auditors' views on the importance of sustainability reporting in public sector organizations, reporting process and auditing. *EDPACS*, 1–33. <https://doi.org/10.1080/07366981.2025.2500200>
- Pasko, O., Chen, F., Kuts, T., Sharko, I., & Ryzhikova, N. (2022). Sustainability reporting nexus to corporate governance in scholarly literature. *Environmental Economics*, 13(1), 61–78. [https://doi.org/10.21511/ee.13\(1\).2022.06](https://doi.org/10.21511/ee.13(1).2022.06)
- Pratama, A., Afiah, N. N., & Alfian, A. (2023). How good is the government? Analysis of west java's local government disclosure through an integrated reporting framework. *Humanities and Social Sciences Letters*, 11(2), 179–202.

<https://doi.org/10.18488/73.v11i2.3350>

- Resler, M., Ostapiuk, N., Tsiatkovska, O., & Bondar, M. (2025). The role of integrated reporting in improving the financial efficiency of the public sector. *Scientific Bulletin of Mukachevo State University. Series "Economics,"* 50–60. <https://doi.org/10.52566/msu-econ1.2025.50>
- Rivera-Arrubla, Y. A., Zorio-Grima, A., & García-Benau, M. A. (2016). El concepto de informe integrado como innovación en reporting corporativo. *Journal of Innovation & Knowledge,* 1(3), 144–155. <https://doi.org/10.1016/j.jik.2016.01.016>
- S., L., K.R.A., B., R., G. K., Bhat, P. K., & A., S. N. (2024). Corporate social responsibility and sustainable development goals: Evidence from responsible business leaders. *Journal of Global Responsibility,* 15(4), 409–435. <https://doi.org/10.1108/JGR-06-2023-0109>
- Svetlozarova Nikolova, B. (2023). Integrated Reports in the Field of Tax Control. In B. Svetlozarova Nikolova, *Tax Audit and Taxation in the Paradigm of Sustainable Development* (pp. 99–118). Springer Nature Switzerland. https://doi.org/10.1007/978-3-031-32126-9_5
- Tirado-Valencia, P., Cordobés-Madueño, M., Ruiz-Lozano, M., & De Vicente-Lama, M. (2019). Integrated thinking in the reporting of public sector enterprises: A proposal of contents. *Meditari Accountancy Research,* 28(3), 435–453. <https://doi.org/10.1108/MEDAR-03-2019-0458>
- Veltri, S., & Silvestri, A. (2015). The Free State University integrated reporting: A critical consideration. *Journal of Intellectual Capital,* 16(2), 443–462. <https://doi.org/10.1108/JIC-06-2014-0077>
- Wylie, J., & Ward, A. M. (2025). The role of stakeholder communication in developing integrated reporting: A longitudinal public sector case study. *Sustainability Accounting, Management and Policy Journal.* <https://doi.org/10.1108/SAMPJ-07-2023-0533>